

## BAB 1 : PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu cita-cita bangsa yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu terjaminnya hak asasi manusia Indonesia. Salah unsur yang harus dijamin hak asasi manusia oleh negara adalah semua warga negara Indonesia mendapatkan akses dan pelayanan kesehatan disemua tingkat fasilitas kesehatan dengan baik<sup>(1)</sup>.

SJSN ditetapkan dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2004 dimana disebutkan bahwa terdapat program utama yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan jaminan yang memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat yang terdaftar menjadi peserta, agar peserta mendapatkan atau dapat merasakan manfaat pelayanan kesehatan<sup>(2)</sup>.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011 diselenggarakan dan dikelola oleh suatu badan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali<sup>(3)</sup>.

Untuk Mewujudkan komitmen global setiap negara mengemban *Universal Health Coverage (UHC)* bagi seluruh penduduk, maka pemerintah bertanggung jawab untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. Berdasarkan tantangan cakupan semesta yang harus dicapai oleh Indonesia dalam *Universal Health Coverage (UHC)* adalah Indonesia dalam hal ini BPJS Kesehatan pada tahun 2019 adalah memperluas cakupan JKN-KIS dengan sasaran kuantitatif yaitu 95% penduduk Indonesia pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) tahun 2019. Cakupan kesehatan semesta juga akan semakin optimal apabila masyarakat atau peserta patuh dalam menjalankan program JKN<sup>(4)</sup>.

Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan jumlah penduduk Indonesia yang terdaftar JKN sampai tahun 2019 sudah mencapai angka 74% dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 265 juta jiwa. Jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh anggaran APBN yakni mencapai 46,92% dari total. Kemudian peserta dari PPU swasta adalah 14,2% dan PBPU sebesar 14,06%. Sedangkan untuk data di Provinsi Sumatera Barat angka kepesertaan program JKN mencapai angka 75,37%. Sedangkan untuk Kota Bukittinggi, jumlah masyarakat yang telah terdaftar JKN mencapai angka 79,36%<sup>(5)</sup>.

Jumlah peserta BPJS mandiri yang semakin tinggi tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan peserta mandiri tersebut dalam membayar iuran JKN. Kepatuhan dalam membayar iuran JKN adalah ketaatan dan kemauan seorang peserta jaminan kesehatan, ketidaktaatan/ketidakmauan peserta untuk membayarkan iuran yang telah ditetapkan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan secara tepat waktu, berdasarkan waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan<sup>(5)</sup>. Bagi peserta BPJS mandiri yang menunggak dalam membayar iuran jaminan kesehatan nasional lebih dari enam bulan, maka penjaminan dalam hal perawatan, pemeliharaan kesehatan dan pemberian pelayanan kesehatan akan diberhentikan sementara, atau dalam kata lain dinonaktifkan untuk sementara waktu sampai iuran kembali dibayarkan dan ditambah dengan denda keterlambatan<sup>(6)</sup>.

BPJS Kantor Cabang Bukittinggi mencatat tunggakan iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional mencapai 68,1 miliar per 4 November 2019 mulai dari peserta mandiri kelas I, II dan III. Berdasarkan data yang telah didapatkan dari Kantor BPJS Kesehatan Kota Bukittinggi berdasarkan wilayah kerja Puskesmas di

Bukittinggi Puskesmas Tigo Baleh memiliki angka tunggakan peserta yang paling tinggi yaitu sebanyak 272 peserta 11,53% dari total jumlah peserta<sup>(7)</sup>.

Banyak sekali faktor yang menyebabkan individu peserta jaminan kesehatan nasional tidak patuh dalam membayar iuran setiap bulannya. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan Teori Anderson dalam Notoadmodjo yaitu dengan model sistem kesehatan (*Health System Model*). Dalam Teori Anderson ini terdapat beberapa faktor yang menentukan seseorang dalam penggunaan pelayanan kesehatan yaitu faktor predisposisi, karakteristik pendukung, dan karakteristik kebutuhan<sup>(8)</sup>. Teori lain yang berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam penggunaan pelayanan kesehatan dapat dijelaskan dengan Teori Lawrence Green dalam Notoadmodjo tahun 2012. Dalam teori ini dijelaskan bawa perilaku kesehatan seseorang dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor pendorong<sup>(1)</sup>. Sedangkan faktor lain yang menunjukkan seseorang patuh atau tidaknya dalam membayar iuran jaminan kesehatan nasional, diantaranya jumlah anggota keluarga, jumlah pendapatan, riwayat penyakit katastropik atau riwayat penyakit yang membutuhkan biaya besar dalam pengobatan, pengetahuan, motivasi dan kenaikan iuran JKN.

Berdasarkan hasil penelitian Dhila Maesa Putri pada tahun 2016 menyebutkan bahwa adanya hubungan jumlah anggota keluarga, jumlah pendapatan yang diterima dan kenaikan iuran JKN dengan kepatuhan membayar iuran JKN di Kota Padang. Hal ini dikarenakan masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga sehingga tidak adanya alokasi pendapatan yang disediakan oleh peserta untuk membayar iuran JKN, ditambah dengan kebijakan kenaikan iuran JKN untuk peserta yang tergolong kelas rawatan I,II dan III.<sup>(1)</sup> Penelitian Rosmanelly pada tahun 2018 riwayat penyakit katastropik atau penyakit yang membutuhkan biaya

pengobatan yang besar seperti hipertensi, jantung, stroke, ginjal, kanker atau penyakit lain terdapat hubungan dengan kepatuhan membayar iuran JKN. Apabila peserta memiliki riwayat penyakit katastropik atau penyakit yang membutuhkan biaya besar untuk pengobatan maka akan semakin tinggi kemauan peserta untuk membayar iuran JKN dan sebaliknya, sehingga semakin tinggi pula tingkat kepatuhan peserta untuk membayar.<sup>(9)</sup> Tingkat pengetahuan seseorang juga memiliki hubungan dengan kepatuhan dalam membayar iuran JKN, hal ini telah disebutkan dalam penelitian sebelumnya oleh Arfilliyah Nur Pratiwi pada tahun 2015<sup>(5)</sup>. Penelitian Arfilliyah Nur Pratiwi pada tahun 2015 juga menyebutkan bahwa motivasi seseorang juga terdapat hubungan dengan kepatuhan dalam membayarkan iuran JKN setiap bulannya.<sup>(5)</sup>

Survei awal yang dilakukan kepada 10 orang responden yang merupakan peserta PBU yang diambil secara acak dan memenuhi kriteria didapatkan 7 orang responden tidak patuh dalam membayar iuran BPJS mandiri. Hal ini disebabkan karena 7 orang responden memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 4 orang. 6 orang responden memiliki pendapatan rata-rata perbulan yaitu Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.1.500.000,-. Responden menjawab bahwa responden beserta anggota keluarga tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi, jantung, kanker, stroke, ginjal atau penyakit yang membutuhkan biaya pengobatan yang tinggi. Dan 6 orang responden memiliki pemahaman dan motivasi yang rendah tentang JKN. Untuk faktor kenaikan iuran, 8 orang responden menjawab terbebani dengan adanya kebijakan kenaikan iuran BPJS mandiri.

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi.

## 1.2 Perumusan Masalah

Rumusan permasalahan dari penelitian ini yaitu apa saja faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi ?

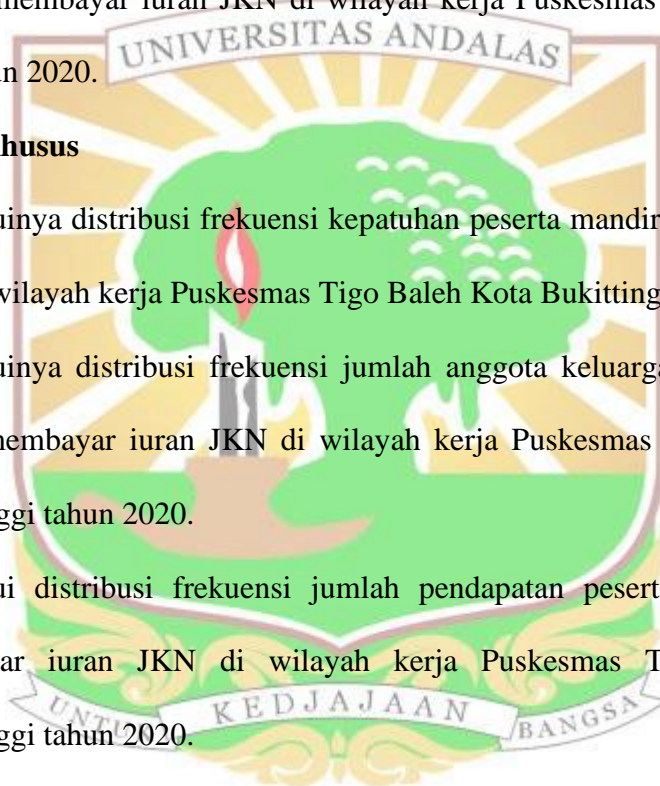
## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

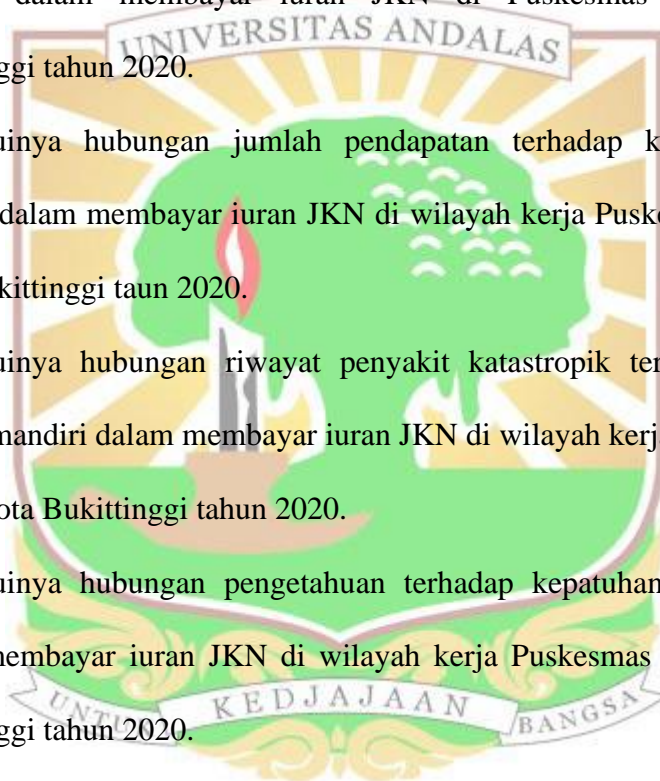
Mengetahui apakah faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi tahun 2020.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Diketuainya distribusi frekuensi kepatuhan peserta mandiri membayar iuran JKN di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi tahun 2020.
2. Diketuainya distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga peserta mandiri dalam membayar iuran JKN di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi tahun 2020.
3. Diketahui distribusi frekuensi jumlah pendapatan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi tahun 2020.
4. Diketuainya distribusi frekuensi riwayat penyakit katastropik terhadap kepatuhan membayar iuran JKN pada peserta mandiri di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi tahun 2020.
5. Diketuainya distribusi frekuensi pengetahuan terhadap kepatuhan membayar iuran JKN pada peserta mandiri di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi tahun 2020.



6. Diketuainya distribusi frekuensi motivasi terhadap kepatuhan membayar iuran JKN pada peserta mandiri di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi tahun 2020.
7. Diketuainya distribusi frekuensi kenaikan iuran JKN terhadap kepatuhan membayar iuran JKN pada peserta mandiri di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi tahun 2020.
8. Diketuainya hubungan jumlah anggota keluarga dengan kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN di Puskesmas Perkotaan Kota Bukittinggi tahun 2020.
9. Diketuainya hubungan jumlah pendapatan terhadap kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi taun 2020.
10. Diketuainya hubungan riwayat penyakit katastropik terhadap kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi tahun 2020.
11. Diketuainya hubungan pengetahuan terhadap kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi tahun 2020.
12. Diketuainya hubungan motivasi terhadap kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi tahun 2020.
13. Diketuainya hubungan kenaikan iuran JKN terhadap kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi tahun 2020.



#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti

Peneliti mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang berharga dalam menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama menjalani perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat.

2. Manfaat bagi institusi pendidikan

Sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dengan variabel yang berbeda.

3. Manfaat bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)

Sebagai bahan informasi, masukan serta bahan pertimbangan bagi BPJS Kesehatan dalam menentukan kebijakan untuk mengcover seluruh penduduk khususnya di Kota Bukittinggi dalam pencapaian *Universal Health Coverage*.

#### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta JKN mandiri dalam membayar iuran JKN di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi tahun 2020, dengan variabel independen (jumlah anggota keluarga, pendapatan, riwayat penyakit katastropik, pengetahuan, motivasi dan kenaikan iuran JKN) dan variabel dependen (kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN).